KAJIAN SEJARAH KAMPUNG DI PERSIMPANGAN JALAN: Menuju Demokratisasi Sejarah

Heri Priyatmoko

Universitas Sanata Dharma
Email: heripriyatmoko@usd.ac.id

ABSTRAK

Dalam dunia historiografi Indonesia, kita sukar mencari kampung sebagai aspek spasial dalam topik kajian para sejarawan. Sekalipun belakangan pengkajian sejarah di Indonesia bergerak dari sejarah makro yang didasarkan pada tradisi pendekatan ilmu-ilmu sosial menjadi sejarah mikro yang bersandar pada pengalaman kehidupan sehari-hari orang kebanyakan, tetapi tetap saja studi sejarah kampung belum disasar. Jika mau jujur, yang tergarap rata-rata sejarah perkotaan dan sejarah pedesaan. Bahkan, aliran postmodern dan postkolonial yang kini banyak diikuti sejarawan juga belum sepenuhnya menerobos lokus yang paling mini. Mereka cenderung berdebat perihal wacana baru dan perspektif yang membebaskan. Pertanyaan yang perlu disodorkan adalah dimana kedudukan sejarah kampung dalam pustaka historiografi Indonesia. Apakah sejarah kampung tidak layak dihadirkan karena selain dianggap tidak menarik, juga dinilai relatif sedikit sumbangannya terhadap pembentukan kesadaran berbangsa dan pembangunan Indonesia. Tulisan ini hendak menjawab beberapa pertanyaan tersebut.

***Kata Kunci**: Historiografi, sejarawan, sejarah kampung*

ABSTRACT

In the context of the Indonesian historiography, it's hard for us to find a region, or kampong, functioning the spatial aspect in the topics done by the historians. Though recently the historical objects in Indonesia have started from the macro history, basing upon the approaches of social science, to the micro history, leaning towards the daily experiences of the common people, the study of history is still not targeted to historical region. To say frankly is that the most objects were the historical towns and the historical villages. Even, postmodern and postcolonial streams, which are now the trends followed by many historians, are not fully in the tiniest locus. However, they tend to have arguments on new discourses and free perspectives. A question that should be delivered is about where the position of the historical regions in the context of the Indonesia's historiographical books is. Is historical region not proper to become the object of study because it's not interesting at all and also because it contributes little to the establishment of the Indonesian national awareness and development? This paper would answer those questions.

***Keywords**: Historiography, historians, historical region*

PENDAHULUAN

Suatu pengalaman yang masih membekas dalam ingatan saya, yakni bapak Lurah di kampung saya pernah bercerita bahwa dirinya kelabakan ketika ditanya oleh anak-anak Sekolah Dasar perihal asal-usul nama kampungnya. Petinggi kampung tersebut tidak dapat menjawab karena memang benar-benar tidak mengetahui riwayat historis kampung yang dipimpinnya. Lurah sebelumnya juga tidak meninggalkan catatan atau dokumen yang bertemali dengan sejarah kampung. Rombongan siswa juga tidak menemukan informasi yang dicarinya di dalam pustaka maupun laman internet. Akhirnya, semua pihak menemukan jalan buntu (Priyatmoko, *Tribun Jateng*, 5 Juli 2017).

Kenyataan di atas membuka kesadaran kita bahwa keberadaan kampung sejatinya tidak bisa diremehkan. Wilayah yang paling mikro ini pasti memiliki kisah masa lalu, hanya saja belum dituliskan. Sebagai ruang sosial dan hunian, setiap kampung tetap mempunyai kisah sejarah yang berbeda-beda. Terasa lucu jika penghuninya justru tidak paham dan peduli terhadap kampungnya sendiri, tempat sehari-hari mereka tinggal dan berinteraksi sosial.

Secara teoritis, kampung menurut Darwis Khudori adalah satu-satunya jenis permukiman yang dapat mewadahi golongan masyarakat Indonesia yang level perekonomian dan tingkat edukasinya paling rendah (walau tidak tertutup bagi warga berpendapatan dan berpendidikan tinggi). Meskipun dalam setiap kampung terdapat organisasi sosial (bentukan pemerintah atau warga kampung sendiri) yang mengelola sekaligus mengawasi tata tertib kehidupan sosial warga kampung yang bersangkutan. Kendati realitas tersebut dapat menjadi pedang bermata dua, yakni di satu pihak pemerintah dapat menancapkan hegemoninya, namun di pihak lain informasi yang sama bisa dipakai penduduknya guna memperjuangkan kepentingannya. Persoalan yang acap muncul, yakni penduduk kampung yang heterogen memiliki kepentingan yang kompleks (Khudori, 2002: 8).

Dalam konteks kewilayahan, keberadaan kampung tidak bisa diabaikan. Di Indonesia, kota-kota pada dasarnya terbentuk melalui hasil aglomerasi dan densifikasi dari perkembangan kampung-kampung yang ada. Bangunan dan perumahan *gedong* muncul setelah proses "pengkotaan" oleh warga kampung menunjukkan hasil. Di sebuah kota, tak mungkin memisahkan keberadaan kampung dengan gedung megah di sekitarnya. Dualisme kota ini sekaligus menjadi wadah bagi tumbuhnya dualisme kehidupan warga. Periode kolonial, pemerintah kota yang dibentuk setelah diberlakukannya Undang-Undang Desentralisasi (1907) juga tidak berani mengusik keberadaan kampung. Bahkan banyak pihak, termasuk dari kalangan pemerintah, menghendaki agar kampung dan warganya dilindungi dan diberi kehidupan yang layak (Silas, 2008: vii-ix).

Dari penjelasan di muka, terlihat bahwa eksistensi kampung dalam rentang panjang sejarah sebenarnya sudah diakui dan diperhatikan oleh pemerintah kolonial. Perhatian mereka terhadap kampung tentu diwujudkan dengan berbagai cara, misalnya penataan jalan kampung, *drainage*, dan penyuluhan kesehatan masyarakat. Peristiwa inilah yang kemudian menarik untuk ditinjau dari kacamata sejarah.

Mengherankan apabila kampung di era Republik justru mengalami keterasingan dalam panggung sejarah. Guna menjawab persoalan dan memahami realitas tersebut, penelitian ini memakai metode sejarah

(Kuntowijoyo, 2013). Penelitian terutama dilakukan dengan melakukan pelacakan sumber sekunder berupa kajian pustaka untuk menjawab permasalahan pokok, dimana kedudukan sejarah kampung dalam pustaka historiografi Indonesia. Apakah sejarah kampung tidak layak dihadirkan karena selain dianggap tidak menarik, juga dinilai relatif sedikit sumbangannya terhadap pembentukan kesadaran berbangsa dan pembangunan Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Menyisir Visi Dan Misi Seminar Sejarah

Sebelum memberikan penjelasan lebih lanjut, ada baiknya dilakukan pelacakan aneka jejak pergulatan penulisan sejarah di Indonesia. Kuntowijoyo melalui buku *Metodologi Sejarah* (2003) yang sampai sekarang masih menjadi panduan mahasiswa jurusan sejarah, mengidentifikasi perkembangan historiografi Indonesia dari masa ke masa (Kuntowijoyo, 2003). Tahun 1957, dianggap dimulainya historiografi Indonesia modern, karena waktu itu di Yogyakarta digelar Seminar Sejarah Nasional Indonesia yang pertama kali. Momen ini diyakini kalangan sejarawan formal sebagai titik tolak kesadaran historis lantaran mengangkat beberapa topik yang sarat aroma dekolonialisasi. Antara lain, konsep filosofi sejarah nasional, edukasi sejarawan, pengajaran sejarah Indonesia di ruang sekolah, serta periodisasi sejarah Indonesia.

Sebagaimana yang dikemukakan Mohammad Ali, misi besar pemerintah yang terbungkus dalam seminar ini ialah bagaimana kepribadian bangsa dapat dibentuk oleh pelajaran sejarah. Materi sejarah Indonesia harus digarap dan dikupas dengan konteks Indonesiasentris sebagai bentuk perlawanan atau sikap kontraproduktif terhadap Neerlandosentris yang merupakan warisan kolonial selama puluhan tahun. Diskusi dan perdebatan yang mengemuka dalam seminar tersebut seputar opini tentang sejarah dan paham *nation* serta watak bangsa Indonesia tanpa ditopang dengan sederet fakta sejarah sekaligus tanpa kesadaran historis. Obrolan serius di forum istimewa ini menonjolkan pemikiran tentang kemungkinan membangun suatu filsafat sejarah nasional (Ali, 1995).

Lebih dari satu dekade kemudian, tepatnya 1970, Seminar Sejarah Nasional Kedua berhasil diselenggarakan. Meski para peserta diskusi masih perlu mengerahkan kedigdayaan dan energi untuk merampungkan isu-isu awal yang dikerjakan secara deskriptif semata, sejumlah paper telah menunjukkan minat yang besar pada pendekatan ilmu sosial dan analitik, dengan meminjam berbagai teori ilmu sosial untuk menerangkan ragam kejadian sejarah. Setelah pertemuan ilmiah ini digelar, lahir tim riset atau panitia guna memulai penggarapan buku standar sejarah Indonesia, yang dikenal dengan judul *Sejarah Nasional Indonesia* (SNI) yang terdiri dari beberapa jilid.

Berlambaran ambisi kuat bahwa pustaka standar tersebut tidak hanya akan memamerkan ketegasan yang Indonesia sentris, namun membawa pula kemajuan yang digapai dalam Seminar Sejarah Nasional Kedua yang menggaungkan mimpi sejarah struktur dan analitik. Hasil dari diksusi akbarini yang hingga sekarang masih dapat dijumpai di rak-rak perpustakaan, yaitu karya tebal SNI, walau puluhan tahun kemudian pada jilid terakhirnya mengundang polemik sejumlah sejarawan yang bertemali dengan tragedi kemanusiaan G30S yang pernah mengoyak kerukunan anak bangsa.

Terdapat jeda relatif lama, baru periode permulaan 1980-an, Seminar Sejarah Nasional Ketiga dilaksanakan di Jakarta guna merespon tantangan ke arah sejarah dengan pendekatan ilmu sosial seperti dijanjikan dalam seminar sebelumnya. Terasa mengesankan, dalam gelaran ilmiah ini ternyata sejarawan Indonesia telah sadar perlunya kesadaran metodologis dan teoritik dalam penyusunan karya sejarah. Tidak hanya rombongan pakar sejarah yang unjuk kepandaian menggugat periode keramat semacam Revolusi Kemerdekaan, tetapi mereka mampu berpikir dengan tujuan sejarah interdisipliner. Sebagai contoh, sejarah revolusi tidak lagi semata-mata peristiwa agung, kiprah orang-orang militer, dan sejarah kepahlawanan, namun juga kajian perihal konflik sosial, kelas sosial, bahkan mengenai perbanditan sosial.

Pemerintah bergerak menghelat Seminar Sejarah Lokal Pertama di Bali, setahun kemudian. Forum ilmiah tersebut menonjolkan kantema dan isu sebuah sejarah yang "*problemoriented*" (Abdullah, 2010). Mengemuka tafsir bahwa Seminar Sejarah Lokal diadakan sebagai gejala mulai merasuknya pengaruh pustaka *Sejarah Lokal di Indonesia* (1978) dengan editor Taufik Abdullah dalam dunia pendidikan sejarah di perguruan tinggi. Dalam sinopsisnya, pustaka ini memang terang-terangan mengajak para sejarawan Indonesia untuk melongok sejenak sejarah lokal di negeri ini. Melalui pemaparan bagaimana tokoh-tokoh di setiap daerah yang diceritakan bersusah payah membangun daerahnya itu, barangkali bisa diapresiasi nilai-nilai luhur yang diaplikasikan oleh beberapa tokoh daerah dalam membangun Indonesia yang lebih jaya dan bermartabat, meski cerita yang ditampilkan oleh delapan penulis asing itu ber-*setting* masa kolonial.

Tekanan dalam seminar itu ialah pada sejarah pedesaan dan kota, dengan komparasi yang sama. Saat itu, meski forum sudah mencantumkan kata "lokal", namun ternyata sejarawan tidak sampai menggapai kehidupan warga kampung sebagai realitas sejarah. Mereka masih berpihak pada peristiwa besar meski ruangnya sudah mikro, yang diulas bukan kisah historis sehari-hari. "Perkembangan dan perubahan" menjadi isu sentral bagi banyak paper, seluruhnya dengan sudut pandang historis. Barisan sejarawan muda rupanya banyak yang berupaya agar ilmunya berfaedah untuk lembaga plat merah alias pemerintah. Dengan semangat serta kesadaran yang mirip, pada September 1984 di Medan dihelat Seminar Sejarah Lokal Kedua. Merujuk keterangan Kuntowijoyo, forum diskusi tersebut patut dikenang karena suatu prestasi tersendiri berhasil mengajak ilmuwan sosial ikut mendiskusikan sejarah. Tercatat sekitar 130 sejarawan dan ilmuwan sosial hadir di situ. Situasi ini wajar terjadi sebab tema sejarah lokal cukup menawarkan banyak kemungkinan, baik dalam pemilihan topik maupun *scope* yang dibicarakan.

Seminar yang digelar selama tiga hari ini mengusung lima pokok tema, yakni (1) dinamika masyarakat pedesaan; (2) pendidikan sebagai faktor dinamisasi dan integrasi sosial; (3) interaksi antar suku bangsa dalam masyarakat majemuk; (4) revolusi nasional di tingkat lokal; (5) biografi tokoh lokal. Kemudian dampak dari ramainya perbincangan dengan mengangkat beragam kasus luar Jawa, akhirnya membawa perubahan pada warna historiografis yang melulu Jawa sentris. Sejumlah sejarawan telah berbagi pengetahuan dan ketrampilan secara merata, setelah lama dirintis melalui seminar, proyek penulisan, dan penerbitan.

Pengujung abad XX, merujuk pada pustaka terbitan Direktorat Kebudayaan dan Pariwisata dari hasil seminar, agaknya tema-tema yang berkembang dalam forum diskusi kala itu lebih cenderung pada unsur integrasi nasional dan kesukubangsaan. Ditinjau secara politis, tentunya lewat TOR seminar, kepentingan negara memang sangat terasa manakala "menuntut" sejarawan ikut berperan besar dalam persoalan identitas kebangsaan dan integrasi bangsa. Kendati harapan negara melalui tangan sejarawan membingkai rakyat dalam semangat kolektif dan memasung mereka dengan nasionalisme lumayan berhasil, namun dimensi sejarah kecil yang tumbuh di akar rumput masih saja tidak diperhatikan.

B. Berjarak dengan Masyarakat

Sampai dekade itu, fenomena sejarah kampung belum mendapatkan ruang untuk diobrolkan, malah justru cenderung tenggelam. Sebetulnya, setahu saya, tema sejarah kampung sebelumnya sudah dipancing oleh dua sejarawan yakni A Adaby Darban dengan skripsinya di jurusan sejarah UGM, *Sejarah Kauman: Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah*, yang diterbitkan oleh Terawang tahun 2000. Selanjutnya, tesis Soedarmono yang menulis *Pengusaha Batik di Laweyan Solo Awal Abad 20* yang dicetak Yayasan Warna Warni Indonesia tahun 2006. Karya Soedarmono ini memang sudah beberapa kali diringkas dan dibawakan dalam kongres sejarah oleh penulisnya. Sayangnya, aspek spasialnya kurang bisa memancing peserta seminar. Yang justru dianggap menarik adalah tentang peranan wanita dalam dunia usaha. Perempuan mempunyai kedudukan tertinggi ketimbang laki-laki sampai mendapat gelar *mbok mase*.

Bagaimana mungkin prioritas sejarah kampung bisa tercapai, sebab institusi seperti Masyarakat Sejarah Indonesia (MSI) yang dianggap mampu memberikan kontribusi besar dalam variasi tema kajian sejarah, ternyata tidak bisa melihat kian ketersingkiran wacana kampung dalam panggung seminar. Bambang Purwanto dengan jeli dan berani menyebut bahwa dalam seminar sejarah yang dihelat MSI pasca Soeharto tumbang, penggiat sejarah akademik belum memiliki kontribusi yang berarti, jika tidak bisa disebut tidak menyumbang apapun untuk menyudahi kebingungan yang akhir-akhir ini sedang menggelayuti warga.

Perlu ditambahkan di sini, kebingungan mereka tentunya terkait juga dengan identitas kedirian dan lingkungan. Sukar mengelak, arus globalisasi dan modernisasi, pelan namun pasti, telah melahirkan ekses yang kurang bagus pada identitas suatu penduduk lokal dan tersingkirnya segenap nilai tradisi yang ada di sekitarnya. Kini tak sedikit warga yang bermukim di perkotaan tidak lagi memakai nama kampung sebagai penanda. Warga cenderung menyebut nama jalan atau gedung sebagai *ancer-ancer* (tanda pengenal). Pergeseran tersebut sepertinya alamiah belaka karena sederet nama kampung tidak lagi banyak dipakai. Tanpa kecuali perkara administratif, pemerintah juga telah meninggalkan dan merasa sudah cukup dengan menuliskan nama jalan atau gang, nomor rumah, RT dan RW. Penataan kawasan dengan memakai sistem administrasi RT dan RW warisan Jepang berperan menggilas nama-nama kampung. Diperparah lagi dengan nama-nama pahlawan yang sering tidak bertemali dengan sejarah lokal. Imbasnya nama kampung kian memudar (Rosyid, *Kompas,* 1 Juni 2010).

Bambang Purwanto mengritik, selama seminar berlangsung, beberapa peserta secara individu seakan-akan berlomba ingin menunjukkan diri mereka sebagai pahlawan historiografi Indonesia di era reformasi. Padahal, sejarah dari penulisan sejarah

Indonesia membuktikan bahwa mereka itulah sebenarnya yang menjadi agen intelektual dan pembela utama dari perspektif yang dikritik (Purwanto dan Adam, 2013: 27).[1]

Sebagian besar sejarawan akademik Indonesia hanya mampu berkomunikasi dengan dirinya sendiri atau paling jauh dengan sesama sejarawan, dan tiba-tiba menjadi orang yang terasing dan canggung ketika harus berhadapan dengan ilmuwan lain. Yang kian mencemaskan adalah sejarawan seakan-akan mengambil jarak alias bersekat dengan masyarakat dalam mengupayakan program "melek sejarah" kampung, meski ada kegiatan pengabdian masyarakat yang diatur dalam regulasi DIKTI (Priyatmoko, *Solopos,* 13 Mei 2014). Tampaknya persoalan ini mau dijawab oleh lembaga Asdep Urusan Sejarah Nasional Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dengan mengadakan sosialisasi buku *Pedoman Penulisan Sejarah Lokal* di Solo tahun 2005. Harapannya, mampu mendorong para peminat sejarah di daerah untuk melakukan penelitian, sehingga mozaik sejarah dan kebudayaan kita dapat ditampilkan secara komprehensip.[2]

Tetapi sayangnya, usaha tersebut hingga kini belum dikatakan sukses. Sebaliknya, muncul banyak penulis yang tidak berprofesi sebagai sejarawan menerbitkan pustaka atau tulisan sejarah kampung yang menyediakan perspektif dari bawah (alternatif) sebagai produk tandingan. Kalangan ini rata-rata berasal dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki kesadaran dan spirit pemberdayaan warga. Segenap perhatian dan karya yang ditelurkan para "sejarawan amatir" tersebut rupanya berpotensi mengisi kekosongan yang belum dapat dikerjakan kelompok sejarawan akademik untuk menempatkan kampung sebagai bahan studi dan mendekonstruksi persepsi bahwa warga dapat menulis sejarahnya sendiri. Artinya, kenyataan tersebut sepenggal bukti bahwa sudah terjadi demokratisasi sejarah di Indonesia. Bisa dikatakan, upaya konkrit mereka berikut hasilnya menjadi tamparan pedas bagi sejarawan yang dinilai sebagai kelompok yang berwenang (otoritatif) merespon kegelisahan itu.

Saya ambilkan contoh, lembaga non-pemerintahan KUNCI Cultural Studies Center dan Sanggar Watu Lunyu, sejak Agustus 2005 menggelar program penyusunan sejarah kampung Juminahan. Tujuan program ini adalah: 1. Memupuk kebanggaan penduduk kampung, terutama para pemuda kampung, terhadap identitas kampungnya. 2. Memperat relasi antargenerasi dan antargolongan penduduk kampung. 3. inventarisasi dan merekam kekayaan kampung (material, budaya, dan pengetahuan kampung) demi membangkitkan kemandirian dan inisiatif kampung dalam menghadapi problematika era kontemporer. 4. Menumbuhkan upaya "melek sejarah kampung"; memposisikan penduduk kampung sebagai penyusun sejarahnya sendiri (Lihat web Kerja_KAMPUNG/Sejarah%20Kampung%20Juminahan%20%20KUNCI_OR_ID.htm).

---

1 Terdapat pula kecenderungan untuk mereproduksi tema-tema yang telah ada dalam jangka waktu yang panjang sehingga tidak terjadi terobosan penting secara tematik. Hingga akhirnya tiadanya perubahan yang mendasar pada kurikulum, materi yang diajarkan, dan metode pembelajaran dalam pendidikan untuk sejarawan di perguruan tinggi.

2 Asdep Urusan Sejarah Nasional Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala, Draf Pedoman Penulisan Sejarah Lokal, dengan pengarah Taufik Abdullah dan Susanto Zuhdi (Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata 2005).

Selain KUNCI, tercatat yayasan *i:boekoe* yang dimotori esais dan arsiparis Muhidin M Dahlan mengulik kampung Patehan Yogyakarta. Kerja serius dan ketekunan para anak muda ini berhasil membuahkan pustaka berjudul *Ngeteh di Patehan* (2011). Artinya, ini adalah bukti telah terjadi demokratisasi sejarah di Indonesia. Dan, itu dimulai di Yogyakarta, tempat seminar sejarah nasional kali pertama dihelat.

Fenomena lainnya yang menarik, yakni perusahaan media massa turut peduli terhadap sejarah kampung dengan menerbitkan hasil liputan dan dijadikan buku untuk dijual bebas. Misalnya, perusahaan harian Solopos menerbitkan buku berjudul *Asale: Cerita di Balik Nama Kampung & Tempat* (Solopos, 2016). Pustaka ini berisi hasil wawancara dengan informan lokal atau sesepuh kampung. Informasi lisan yang diperoleh sangat berharga, karena tidak banyak ditemukan dalam pustaka. Dengan demikian, pengayaan pengetahuan sejarah kampung terpenuhi secara tidak langsung. Begitu pula yang dikerjakan oleh jurnalis atau individu yang menulis kampung halamannya ikut menambah wawasan sejarah perkotaan, kendati secara metodologi tidak terlalu ketat. Buku berjudul *Solo* yang disusun Hendromasto Prasetyo menjadi bukti bahwa kota yang terdiri dari ingatan akan kampung dan jalan tetap menggelitik untuk dikupas sesuai kepentingan kekinian (Prasetyo, 2014).

Mulai tahun 2017, muncul kesadaran dalam Direktorat Sejarah yang memberi angin segar terhadap penulis sejarah di tingkat lokal untuk meneliti aspek lokal. Buku berjudul *Grebeg Sudiro: Wujud Keberagaman Masyarakat Surakarta* garapan Sumargono merupakan salah satu produk dari program fasilitasi ini. Karya tersebut mengangkat dinamika sejarah kampung Balong dan Kalurahan Sudiroprajan yang menghelat festival grebeg sebagai bentuk akulturasi Jawa-Tionghoa untuk menangkis konflik pribumi dan non-pribumi yang pernah meledak beberapa kali di Kota Bengawan (Sumargono, 2017). Program bantuan penulisan ini tentu menarik minat komunitas atau individu dalam mengangkat sejarah kampung dalam panggung sejarah nasional.

C. Saatnya Peduli Kampung

Tidak dipungkiri kajian mengenai kota dewasa ini kian mendapat tempat. Terlebih lagi, maraknya kegiatan *blusukan* sejarah yang digelar oleh komunitas. Semenjak nama Joko Widodo naik panggung politik kekuasaan, tampaknya terminologi *blusukan* bermakna penting. Apalagi, selepas mantan juragan mebel ini naik sebagai presiden, barisan tokoh politik dan pejabat negeri bertindak seperti kata kerja *blusukan* tersebut. Mereka keluar-masuk gang kampung meninjau kondisi masyarakat sekaligus mencari dukungan politik.

Studi tentang sejarah perkotaan yang dilakukan oleh banyak sejarawan ternyata juga belum mengarah pada kampung, ruang yang lebih kecil. Malah kalangan arsitek dan ilmuwan lainnya yang berpaling untuk menggarap kampung sebagai wujud kepedulian intelektual dan kultural. Mungkin ada sebagian sejarawan yang berusaha berkilah dengan mengatakan bahwa kadar keunikan kampung rendah dan terlalu sempit untuk dikaji. Argumentasi ini mudah terpatahkan dengan mengutip pidato pengukuhan Bakti Setiawan bahwa kampung sesungguhnya dapat dilihat sebagai satu organisme yang hidup, tumbuh, dan berkembang. Kekhasan kampung justru terletak pada pola-pola fisik yang beragam, organik, seringkali mengejutkan, di luar kadar kreatifitas arsitek yang jenius sekalipun. Setiap kampung adalah unik, karena tiap kampung merepresentasikan kekhasan

sejarah, kemampuan, usaha, perjuangan, dan bahkan jiwa merdeka warganya. Kalau ada seribu kampung di satu kota, dapatlah dipastikan akan ada seribu ragam wajah kampung dan jiwa yang berbeda (Setiawan, 2010).

Kampung sebetulnya kaya akan tema. Sebagaimana yang ditawarkan oleh LSM, cakupan sejarah kampung meliputi (1) sejarah asal-usul kampung, pendatang, dan wilayah hunian; (2) sejarah pendidikan; (3) sejarah hiburan, pengisian waktu luang, dan permainan; (4) sejarah makanan kampung; (5) sejarah bangunan, arsitektur, dan lingkungan; (6) sejarah kesehatan dan pengobatan tradisional; (7) sejarah aktivitas keseharian dan gaya hidup kampung.

Dengan menulis sejarah kampung, kita sebenarnya telah membedah dan memahami dinamika penduduk lokal dan keterkaitannya dengan lokalitas lain dan "dunia luar" umumnya. Juga melacak riwayat, perkembangan, gejolak dan keresahan dari perwujudan dan pemikiran budaya lokal serta memahami sumber daya tahan tradisi lokal. Bukan hanya itu, kita mengais dan menggairahkan kembali sumber-sumber kreativitas lokal. Kerja ini turut menggali dan memahami *local knowledge* (kawruh lokal) dan *local wisdom* (kearifan lokal) yang sudah lenyap terseret arus perubahan yang dipaksakan dari luar khususnya perihal sikap terhadap lingkungan alam dan relasi sosial. Dan setidaknya, muncul kelegaan yaitu sejarawan berperan dalam inventarisasi dan merekam sumber-sumber sejarah lokal. Sejarawan juga mengedukasi dan melatih peminat sejarah dalam penulisan sejarah lokal. Upaya ini menunjang pengembangan pariwisata daerah (Asdep Urusan Sejarah Nasional Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala, 2005).

KESIMPULAN

Kampung sebagai kajian sejarah memang belum semarak dalam historiografi Indonesia. Kampung tidak masuk dalam agenda besar pemerintah, yang kemudian berimbas pada sejarawan akademis untuk turut tidak memikirkannya. Aspek kampung berikut penghuninya menjadi "anak tiri", karena dinilai tidak mampu menyumbang atau melahirkan gagasan untuk membangun keindonesiaan dan nasionalisme. Arus modernisasi menggoda sejarawan untuk menelisik sejarah pedesaan dan perkotaan, tanpa menempatkan studi kampung secara mandiri.

Kampung adalah sistem sosial yang kompleks dan dinamis. Kampung menjadi semacam kolase mini warga kota yang memungkinkan mereka untuk terus mengembangkan prinsip-prinsip keragaman, toleransi, dan kesetiakawanan. Inilah yang sekiranya melatarbelakangi mengapa sejarawan Indonesia perlu segera meramaikan historiografi Indonesia dengan menghadirkan sejarah kampung, atau paling tidak melalui jalur pengabdian demi membuat warga "melek" sejarah kampung.

Sejarawan harusnya sadar bahwa manakala masyarakat lokal tidak lagi memahami sejarah sebagai sebuah situs di daerahnya, maka bisa dipastikan perasaan *handarbeni* (memiliki), merawat dan menjaga akan hilang. Jika demikian halnya, transformasi nilai historis dan spirit sebuah situs terhadap penduduk lokal, tidak akan terjadi. Bila kampung menjadi bagian penting masa depan kota di Indonesia berarti memperkuat integrasi kampung dalam sistem kota yang lebih kompleks. Kegiatan di kampung justru menjamin keberlanjutan kampung dan menciptakan kondisi kota yang makin hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, Taufik (editor). 2010. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.

Ali, Mohammad. 1995. "Beberapa masalah Tentang Historiografi Indonesia", dalam Soedjatmoko, *Historiografi Indonesia Sebuah Pengantar*, Jakarta: Gramedia.

Asdep Urusan Sejarah Nasional Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala, 2005. *DrafPedoman Penulisan Sejarah Lokal*. Jakarta: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.

Dahlan, Muhidin M,. 2011. *Ngeteh di Patehan*. Yogyakarta: I:Boekoe.

Darban, A. Adaby. 2000. *Sejarah Kauman: Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah*. Yogyakarta: Terawang.

Khudori, Darwis. 2002. *Menuju Kampung Pemerdekaan, Membangun Masyarakagt Sipil dari Akar-akarnya. Belajar dari Romo Mangun di Pinggir Kali Code*. Yogyakarta: Yayasan Pondok Rakyat.

Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah* (edisi kedua). Yogyakarta: Tiara Wacana.

Prasetyo, Hendromasto. 2014. *Solo*. Jakarta: Rehal Pustaka.

Priyatmoko, Heri. 2014. "Kenali Sejarah Kampungmu", *Solopos*, 13 Mei.

Priyatmoko, Heri. 2014. "Kampung!" *Koran Tempo*, 20 Mei 2014.

Priyatmoko, Heri. 2017. "Toponimi Kampung yang Tenggelam" *Tribun Jateng*, 5 Juli.

Purwanto, Bambang dan Asvi Warman Adam. 2013. *Menggugat Historiografi Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.

Rosyid, Imron. 2010. "Menghadirkan Kembali Nama Kampung di Perkotaan", *Kompas* 1 Juni.

Setiawan, Bakti. 2010. *Kampung Kota dan Kota Kampung: Tantangan Perencanaan Kota di Indonesia*, pidato pengukuhan jabatan guru besar dalam Ilmu Perencanaan Kota. Yogyakarta: UGM.

Silas, Johan. 2008. "Pengantar" dalam Akhudiat, *Masuk Kampung Keluar Kampung: Surabaya Kilas Balik*. Surabaya: Henk Publica.

Soedarmono. 2006. *Pengusaha Batik di Laweyan Solo Awal Abad 20*. Jakarta: Yayasan Warna Warni Indonesia.

Solopos. 2016. *Asale: Cerita di Balik Nama Kampung & Tempat*. Surakarta: PT. Aksara Solopos.

Sumargono. 2017. *Grebeg Sudiro: Wujud Keberagaman Masyarakat Surakarta*. Jakarta: Direktorat Sejarah.